

DESAIN KEBIJAKAN PULAU HARAPAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DENGAN MENGGUNAKAN *INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELING*

Naomi Heumasse, Rosmawaty Anwar, Nungky Puspita
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

Abstract

Evaluation of the policy on Pulau Harapan through the development of marine tourism was deemed necessary to be done in order to develop a design or model of appropriate, efficient, effective and sustainable policies. However, the extent of the impact of marine tourism development for socio-economic life and well-being of local communities in this tourist destination is still not known with certainty and depth. ISM is a methodology that can help to identify the relationship between the idea desicive structures in a complex problem. ISM method is used to analyze the relationship and dependencies among the elements that make up the structure of marine tourism development design in Pulau Harapan. From the discussion, the experts then identified five critical factors that need to be studied, namely the elements of the program requirements, a major obstacle, the public sector is involved, goals and institutions involved. These five elements can minimize constraints that exist because they are supported by a program requirement, also with the involvement of the institution, as well as the involvement of influential community that marine tourism destination development program will achieve.

Keywords: Policy, Development, Marine Tourism, ISM, Element.

LATAR BELAKANG

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 km merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km² terdiri dari laut teritorial sekitar 0,3 juta km², laut Nusantara sekitar 2,8 juta km², dan Zona Eksklusif Indonesia sekitar 2,7 juta km². Kawasan ini adalah kawasan yang kaya akan berbagai sumberdaya bahari dan laut yang merupakan salah satu aset pembangunan pariwisata di Indonesia yang perlu dikelola secara efisien dan berkelanjutan (Azis, 2003).

Pembangunan di wilayah pesisir, merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dan merata, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta kondisi lingkungan sumberdaya alam yang ada (Yudasmara, 2004).

Kegiatan wisata bahari di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu memiliki arti penting karena Kepulauan Seribu dikenal sebagai kawasan wisata. Dari pulau-pulau yang dimanfaatkan sebagai objek wisata, hingga saat ini 11 pulau yang telah

dikembangkan sebagai pulau wisata yang melayani masyarakat umum, baik wisatawan asing maupun domestik. Salah satu pulau yang dikembangkan untuk wisata bahari di Kepulauan Seribu tersebut adalah Pulau Harapan (Aziz, 2003).

DKI Jakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari (destinasi wisata bahari) banyak menyimpan potensi sumberdaya alam yang diharapkan oleh wisatawan karena sebagian wilayahnya merupakan gugusan, pulau-pulau kecil, taman nasional laut, cagar alam, suaka margasatwa serta hotel dan *resort*. Wisata bahari yang telah dikembangkan saat ini antara lain: wisata pulau, wisata pesisir, wisata selam (*diving*), selancar, renang, memancing, *parasailing*, *jetsky*, *snorkling*, sampan (*canoeing*). Namun beberapa atraksi pulau tersebut lebih banyak dikembangkan di gugusan Kepulauan Seribu yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKP Kota Jakarta, 2010).

Pulau Harapan merupakan pulau berpenduduk kecil yang memiliki potensi wisata yang cukup

mempesona, tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu Jakarta Utara. Pulau Harapan kini telah berkembang pesat menjadi objek wisata pantai dan bahari karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta Utara yaitu hanya sekitar 72 mil, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Harapan. Dengan adanya pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan tersebut membawa pengaruh sosial-ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan yang terdapat di Pulau Harapan berkaitan dengan desain kebijakan dalam pengembangan wisata bahari sebagai destinasi wisata pulau adalah kondisi sumberdaya alam Pulau Harapan untuk pengembangan wisata bahari, potensi wisata bahari yang ada di Pulau Harapan dapat dikelola untuk wisata bahari dan kebijakan pembangunan wisata di Pulau Harapan dapat menunjang pengembangan wisata bahari.

Evaluasi terhadap kebijakan pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan dipandang perlu untuk dilakukan agar terlahir suatu desain atau model kebijakan yang sesuai, efisien, efektif dan berkelanjutan. Namun demikian sejauh mana pengembangan pariwisata bahari berpengaruh bagi kehidupan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat yang ada di daerah tujuan wisata masih belum diketahui secara pasti dan mendalam. Oleh sebab itu, masalah ini menjadi menarik dan penting untuk diketahui.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Juli 2014. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif evaluatif yaitu untuk menggambarkan atau menguraikan sifat dari suatu fenomena atau keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan mengkaji penyebab dari gejala-gejala tertentu.

Metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM). ISM adalah sebuah metodologi dan interaktif dan

sebuah implementasi dalam suatu pengaturan kelompok. Analisis ISM bertujuan untuk mengkaji alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam pengembangan wisata bahari Pulau Harapan "yang sama atau sama dengan" (Saxsena, 1992). Arti dari "yang sama atau sama dengan" adalah gagasan atau ide tentang kebijakan yang didapat dari pakar-pakar yang terkait, apakah gagasan tersebut sama dengan gagasan yang sudah ada atau sama dengan gagasan yang lainnya. ISM dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa jenis struktur termasuk pengaruh struktur (misalnya mendukung atau memperburuk), struktur prioritas (lebih penting dari 'atau' akan dipelajari terlebih dahulu) dan kategori dari setiap gagasan atau ide (misalnya mempunyai kategori yang sama atau sama dengan) (Saxsena, 1992).

Menurut Saxsena (1992) dalam Ramli (2010) program didalam ISM dapat dibagi menjadi sembilan elemen yaitu: 1) sektor masyarakat yang terpengaruh, 2) kebutuhan dari program, 3) kendala utama, 4) perubahan yang dimungkinkan, 5) tujuan dari program, 6) tolak ukur untuk menilai setiap tujuan, 7) aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan, 8) ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai oleh setiap aktivitas, 9) lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam analisis ISM adalah menentukan elemen-elemen yang sesuai dengan topik penelitian dan kondisi wilayah studi. Selanjutnya disusun sub-sub elemen pada setiap elemen yang terpilih. Pemilihan elemen dan penyusunan sub-elemen dilakukan melalui diskusi dengan pakar. Pakar-pakar tersebut antara lain perwakilan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Balai Konservasi dan Taman Laut Kepulauan Seribu, tokoh masyarakat lokal (Ketua RT), wisatawan, masyarakat sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai yang terkena dampak pariwisata. Dari sembilan elemen dipilih menjadi lima elemen dan pemilihan lima elemen tersebut berdasarkan survey lapangan serta kecocokkan sesuai dengan masalah penelitian. Sedangkan penyusunan sub elemen didapat dari hasil diskusi bersama pakar-pakar, apa yang menjadi masalah di lapangan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Harapan. Penilaian sub-elemen menggunakan perbandingan berpasangan dengan simbol VAXO dimana:

V jika $E_{ij} = 1$ dan $E_{ji} = 0$ X jika $E_{ij} = 1$ dan $E_{ji} = 1$

A jika $E_{ij} = 0$ dan $E_{ji} = 1$ O jika $E_{ij} = 0$ dan $E_{ji} = 0$

Dimana nilai $E_{ij} = 1$ berarti ada hubungan kontekstual antara sub-elemen ke-i dan ke-j, sedangkan $E_{ji} = 0$ berarti tidak ada hubungan kontekstual antara sub-elemen ke-i dan ke-j. Hasil penelitian tersebut, tersusun dalam *Struktural Self Interaction Matrix* (SSIM) yang dibuat dalam bentuk tabel *Reachability Matrix* (RM) dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Matriks tersebut kemudian diubah menjadi matriks tertutup. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi matriks tersebut memenuhi kaidah *transitivity* yaitu jika mempengaruhi B dan B mempengaruhi C, maka A harus mempengaruhi C.

Langkah berikutnya adalah menyusun hirarki setiap sub-elemen pada elemen yang dikaji dan mengklasifikasikannya dalam empat sektor, apakah sub-elemen tersebut termasuk dalam sektor *autonomus, dependent, linkage, atau independent*.

Berdasarkan metode yang digunakan terhadap lima elemen yakni: Elemen sektor masyarakat yang terpengaruhi, elemen kebutuhan dari program, elemen kendala utama, elemen lembaga yang terlibat, dan elemen tujuan dari program. Dari elemen-elemen tersebut maka berikut ini akan diuraikan masing-masing setiap elemen yaitu:

1. Elemen tujuan terdiri dari: a) peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, b) memenuhi syarat kecukupan yang ditetapkan, c) terbukanya lapangan kerja, d) meningkatkan daya saing pariwisata, e) mengurangi pencemaran lingkungan dan f) meningkatkan pendapatan daerah.
2. Elemen kebutuhan yaitu: a) infrastruktur, b) sarana dan prasarana, c) pendidikan lingkungan non formal, d) ketersediaan alat, e) sumberdaya manusia, f) kemudahan birokrasi, g) pemodal, h) manajemen, i) kebijakan pengembangan pariwisata, j) lembaga penyuluhan, k) pemasaran, l) keamanan, m) kerjasama dan n) kerjasama antar daerah.
3. Elemen kendala yaitu: a) rendahnya komitmen para pelaku wisata, b) terbatasnya infrastruktur, c) perbedaan tujuan, d) kekuatan manajemen, e) pola kemitraan, f) rendahnya kualitas, g) peraturan, h) persaingan kebutuhan, i) rendahnya partisipasi masyarakat, j) kurangnya atraksi wisata dan k) koordinasi antar instansi.

4. Elemen lembaga yang terlibat yaitu: a) pemerintah DKI Jakarta, b) dinas pariwisata, c) koperasi, d) lembaga penegak hukum, i) perguruan tinggi, j) pengusaha dan k) YLK.
5. Elemen sektor masyarakat yang terpengaruhi yaitu: a) masyarakat setempat, b) wisata kuliner, c) pengembang wisata, d) jumlah wisatawan, e) pemerintah, f) produk wisata, g) pedagang souvenir, h) tenaga kerja yang terlibat, i) LSM dan j) pengusaha jasa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Harapan memiliki sumberdaya hayati pesisir yaitu terumbu karang, mangrove, dan lamun. Kondisi terumbu karang berdasarkan hasil analisis, nilai persentase penutupan substrat pada kedalaman 3 meter, terdiri dari karang mati (KM) sebesar 46,2%, karang hidup (KH) sebesar 26,7%, patahan karang (R) sebesar 21,5%, karang lunak (KL) sebesar 2,6%, *sponge* sebesar 3%. Menurut English et al. (1994), nilai persentase penutupan karang hidup sebesar 26,7% tergolong kondisi "sedang". Berdasarkan kategori karang hidup yang terdapat di Pulau Harapan, maka Pulau Harapan berpotensi untuk pengembangan wisata bahari kategori wisata snorkeling.

Kondisi terumbu karang berdasarkan hasil analisis, nilai persentase penutupan substrat pada kedalaman 10 meter, terdiri dari karang hidup (39,6%), karang mati (KM) sebesar 29%, patahan karang (R) sebesar 25,2% dan karang lunak sebesar 1,9%. Hal ini menggambarkan kondisi terumbu karang di daerah ini mengalami kerusakan yang cukup tinggi.

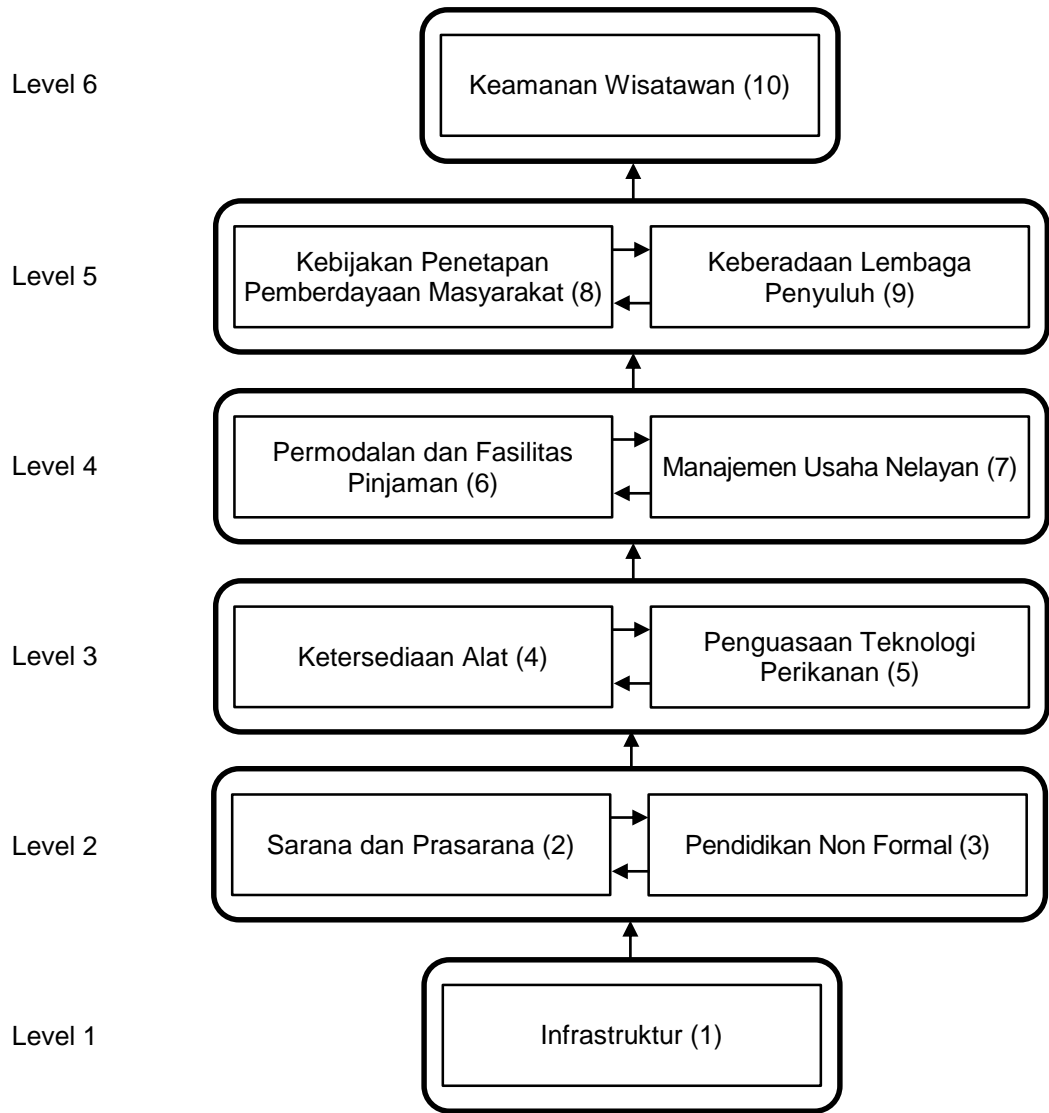
Ada 2 jenis mangrove yang ditemukan di Pulau Harapan. *Rhizophora* spp merupakan jenis mangrove yang sengaja ditanam di pulau tersebut. Berdasarkan morfologinya, jenis mangrove tersebut tampak seperti *Rhizophora apiculata* dimana jenis ini memiliki kulit batang maupun akar yang halus dan warnanya agak kemerahan. Namun, dikarenakan mangrove tersebut masih dalam bentuk semai dan anakan yang masih belum matang, sehingga untuk memastikannya agak sulit. Adapun untuk jenis *Rhizophora mucronata* hanya ditemukan di Timur Pulau Harapan dimana jenis ini merupakan mangrove alami yang masih tersisa.

Pulau Harapan memiliki hanya 2 jenis lamun. Lamun jenis *Cymodocea rotundata* lebih banyak

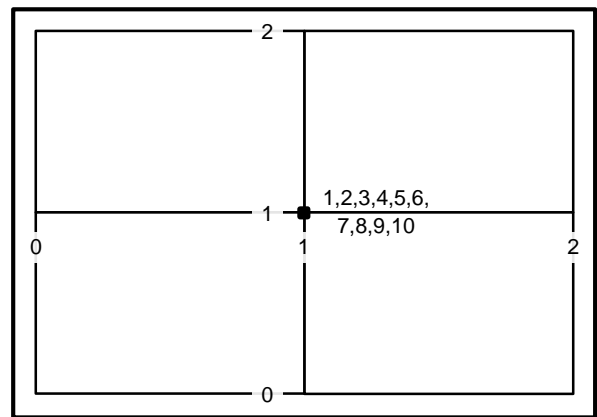
ditemukan di Pulau Harapan. Adapun pengambilan data lamun dilakukan jauh dari garis pantai

dikarenakan di tepi pantai tidak ditemukannya adanya lamun.

Elemen Kebutuhan Program dalam Pengembangan Wisata Bahari



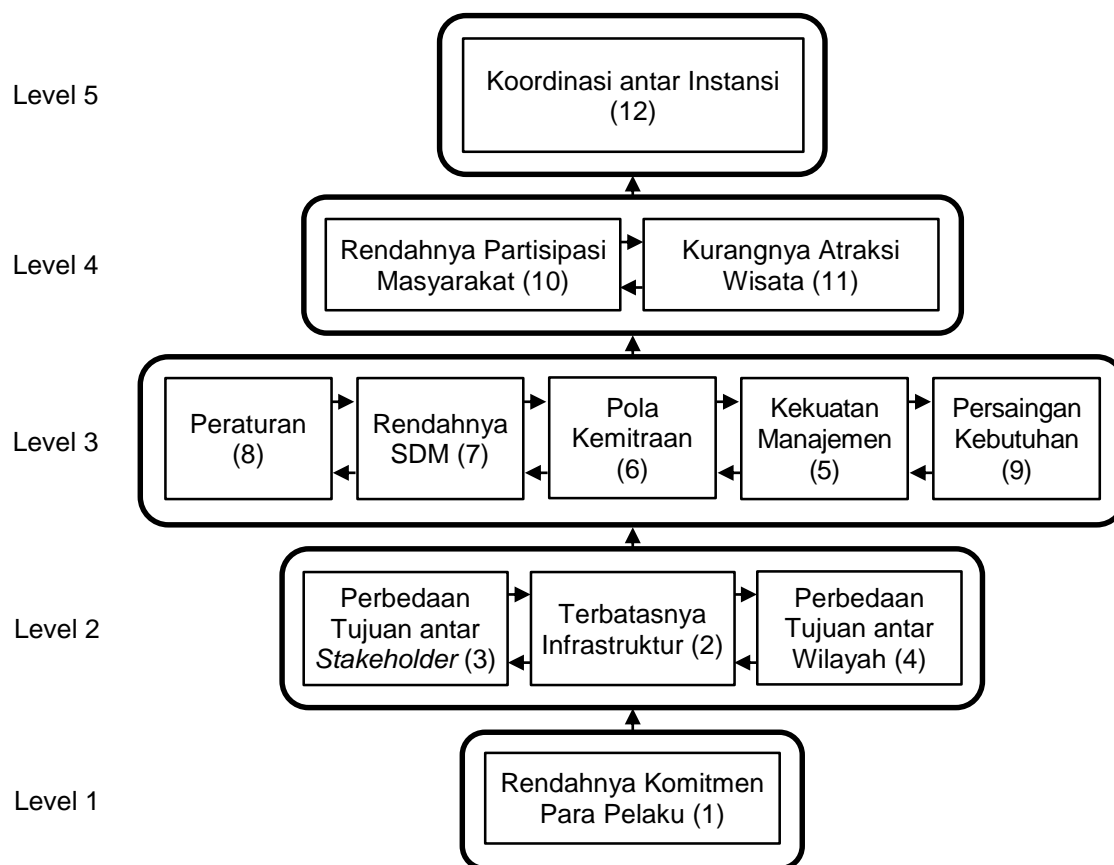
Berdasarkan diagram hirarki elemen kebutuhan pengembangan destinasi wisata bahari di Pulau Harapan menunjukkan bahwa yang menjadi elemen kunci dalam pengembangan destinasi wisata bahari adalah infrastruktur. Hal ini disebabkan karena infrastruktur untuk kegiatan wisata bahari di Pulau Harapan sangat minim. Hal ini ditunjukkan oleh waktu pengoperasiannya yang hanya dilakukan sekali dalam sehari yaitu hanya pukul 07.30 WIB. Dengan jam pengoperasian yang hanya sekali dalam sehari akan sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Harapan.



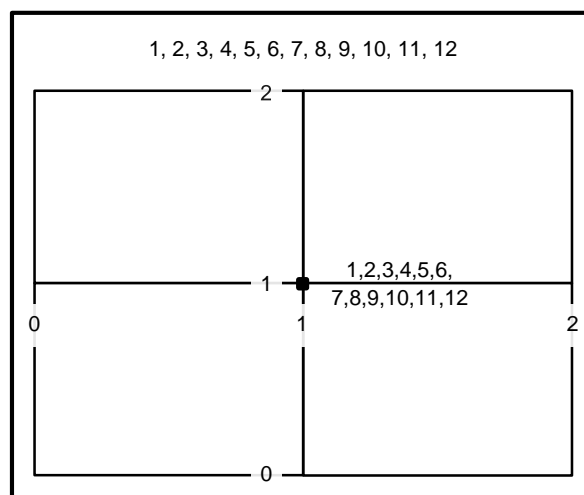
Hasil analisis ISM, memperlihatkan sebaran setiap sub elemen kebutuhan program menempati dua sektor masing-masing sektor II dan III. Hal ini menunjukkan bahwa sub elemen kebutuhan program pengembangan wisata bahari yang paling dibutuhkan terletak pada sektor III (*linkage*) dimana sub elemen tersebut merupakan kekuatan penggerak (*driver power*) yang besar dalam pengembangan wisata bahari dengan tingkat ketergantungan (*dependent*)

yang tinggi terhadap sub elemen ini. Apabila sub elemen yang terdapat di dalam kuadran *linkage* ditangani dan dikelola dengan baik maka pengembangan wisata bahari itu akan menjadi lebih optimal oleh karena kuadran *linkage* merupakan pendorong laju perkembangan wisata bahari di Pulau Harapan, sehingga sub elemen ini harus dikaji secara hati-hati karena memiliki keterkaitan yang sangat tinggi dengan sub elemen lainnya.

Elemen Kendala Utama Program Pengembangan Wisata Bahari



Berdasarkan diagram hirarki elemen kendala pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan, menunjukkan bahwa yang menjadi elemen kunci dalam pengembangan wisata bahari Pulau Harapan adalah rendahnya komitmen para pelaku yang terlibat. Hal ini disebabkan karena para pelaku yang terlibat bukan dari latar belakang pendidikan kepariwisataan. Untuk meningkatkan komitmen para pelaku yang terlibat diperlukan tenaga-tenaga kerja yang terdidik dan terlatih serta mempunyai keinginan kerja di bidangnya. Kelima level tersebut, level yang sejajar boleh ditangani secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri, tergantung hasil kesepakatan bersama dengan pihak yang berwenang.



Elemen kunci pada elemen kendala utama dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan adalah rendahnya komitmen para pelaku yang terlibat, penanganannya harus diutamakan daripada level berikutnya. Berdasarkan *driver power* dan *dependence*, sub elemen (1) Rendahnya komitmen para pelaku yang terlibat, (2) Terbatasnya infrastruktur, (3) Perbedaan tujuan antar stakeholder,

(4) kesediaan Perbedaan tujuan antar wilayah administratif, (5) Kekuatan manajemen, (6) Pola kemitraan sepihak masuk dalam sektor *linkage*. Hal ini memberikan makna bahwa keenam sub elemen ini sangat harus dikaji secara hati-hati karena hubungan antara sub elemen memiliki keterkaitan yang sangat tinggi dengan sub elemen lainnya.

Elemen Sektor Masyarakat yang Terpengaruh Pengembangan Wisata Bahari

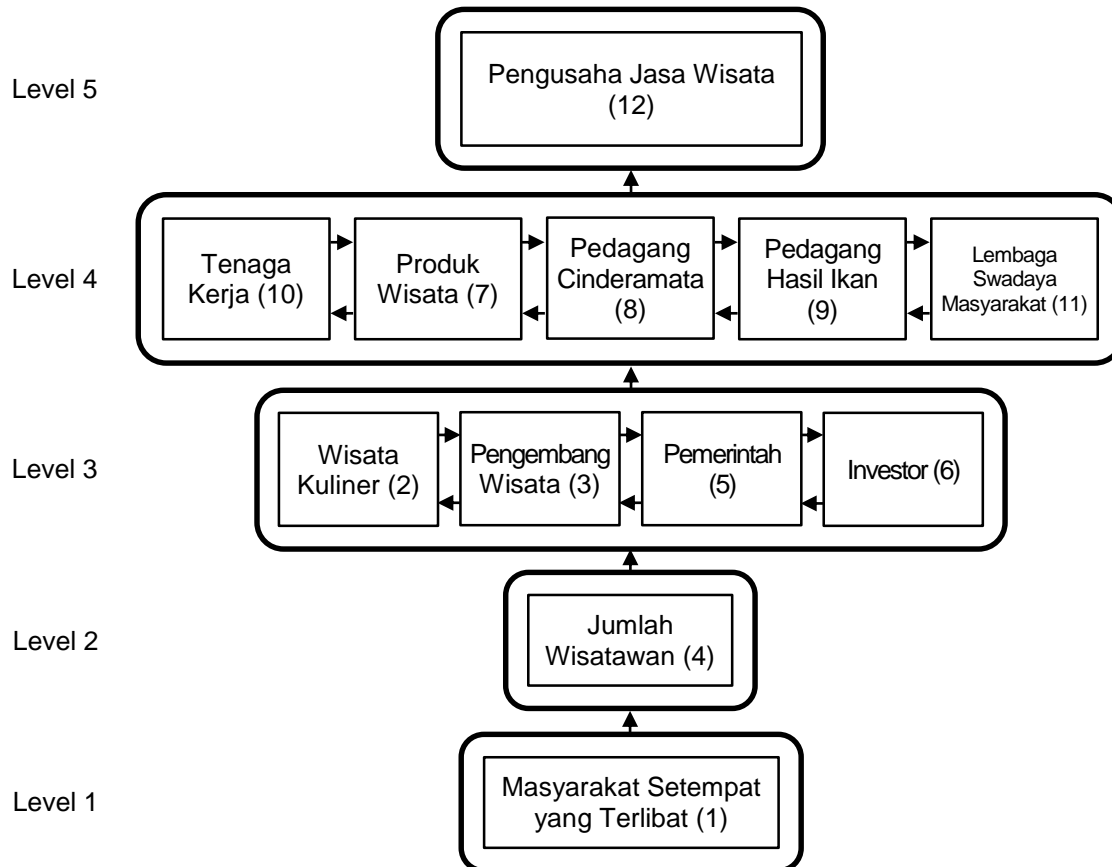
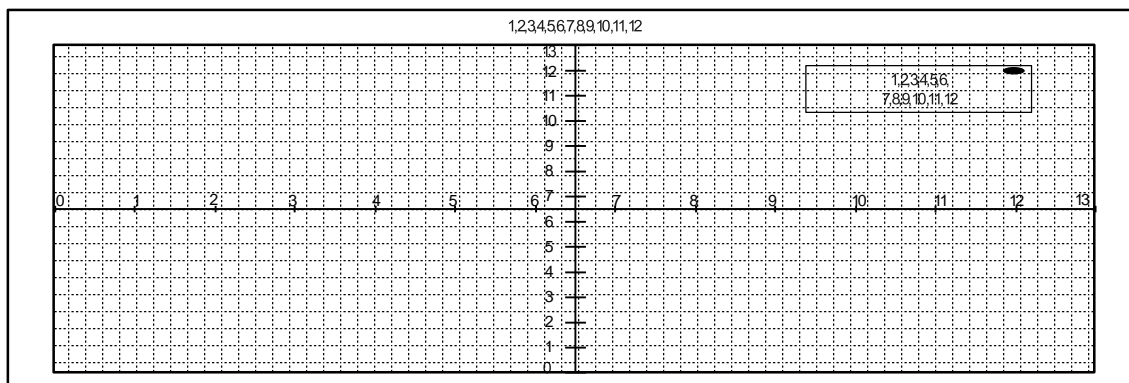


Diagram hirarki dari elemen sektor masyarakat, menunjukkan bahwa stuktur tersebut memberikan makna bahwa pada setiap level memiliki kepentingan masing-masing. Level 1 adalah elemen kunci dari sebuah kebijakan yang harus lebih awal dikerjakan atau ditangani. Begitu pun level 2 dan 3 serta berikutnya, penanganannya boleh dilakukan secara sendiri-sendiri dan boleh secara bersamaan, tergantung kesepakatan oleh para penentu kebijakan. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara *bottom up*. Artinya kebijakan tersebut diperlakukan mulai dari masyarakat bawah hingga kalangan masyarakat atas dan pemerintah sebagai fasilitator. Sektor masyarakat lokal yang terlibat wisata bahari

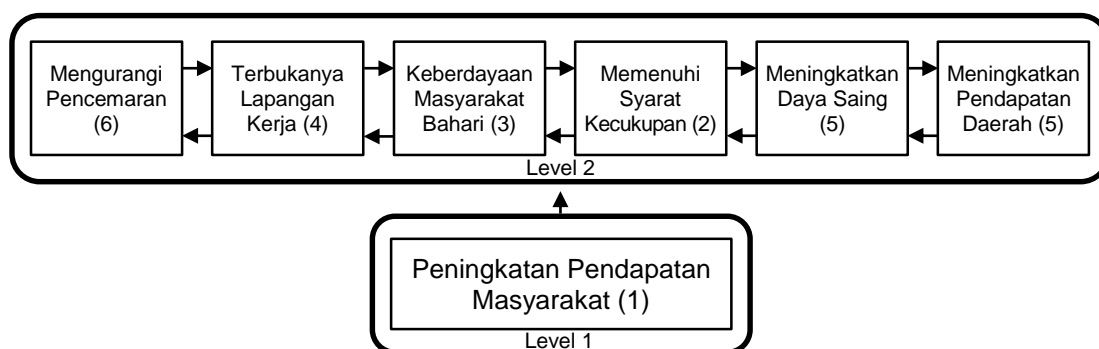
merupakan elemen kunci dan sekaligus menjadi penggerak utama yang akan mempengaruhi sub elemen kunci pada level berikutnya. Pariwisata diharapkan memberikan *trickledown effect* bagi perekonomian masyarakat di Pulau Harapan. Masyarakat Pulau Harapan bisa terlibat dalam banyak bidang usaha yang meliputi; penginapan, akomodasi, *safety* dan kuliner lokal. Pulau Harapan menjadi salah satu wilayah konservasi Mangrove di kawasan Kepulauan Seribu. Sejak lima tahun terakhir konservasi mangrove dilakukan secara partisipatif melibatkan warga masyarakat. Saat ini hampir di setiap RT terdapat tempat pembudidayaan mangrove.



Hasil analisis ISM, memperlihatkan sebaran setiap sub elemen kebutuhan program menempati sektor III. Dimana sub elemen tersebut merupakan kekuatan penggerak (*driver power*) yang besar dalam pengembangan wisata bahari dengan tingkat ketergantungan (*dependent*) yang tinggi terhadap sub elemen ini. Apabila sub elemen yang terdapat di dalam kuadran *linkage* ditangani

dan dikelola dengan baik maka pengembangan wisata bahari itu akan menjadi lebih optimal oleh karena kuadran *linkage* merupakan pendorong laju perkembangan wisata bahari di Pulau Harapan, sehingga sub elemen ini harus dikaji secara hati-hati karena memiliki keterkaitan yang sangat tinggi dengan sub elemen lainnya.

Elemen Tujuan dari Program Pengembangan Wisata Bahari

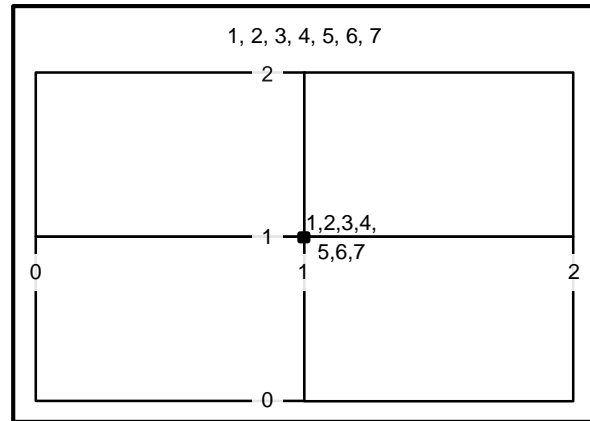


Hasil analisis ISM, menunjukkan bahwa sub elemen peningkatan pendapatan masyarakat setempat merupakan sub elemen kunci. Menurut keterangan beberapa penduduk, nelayan pada umumnya belum memiliki kesadaran untuk berwirausaha di luar usaha mereka sebagai nelayan. Selain itu, kebiasaan menabung juga belum tumbuh di kalangan masyarakat nelayan. Banyak kalangan masyarakat nelayan yang merasa bahwa usaha melaut akan terus memberikan penghasilan buat mereka. Akibatnya tidak jarang mereka berperilaku boros karena beranggapan besok masih akan mendapat hasil tangkapan. Bidang usaha lain yang digeluti penduduk Pulau Harapan yaitu perdagangan dan keterampilan. Saat ini sudah ada beberapa keluarga yang memiliki usaha pembuatan kerupuk ikan.

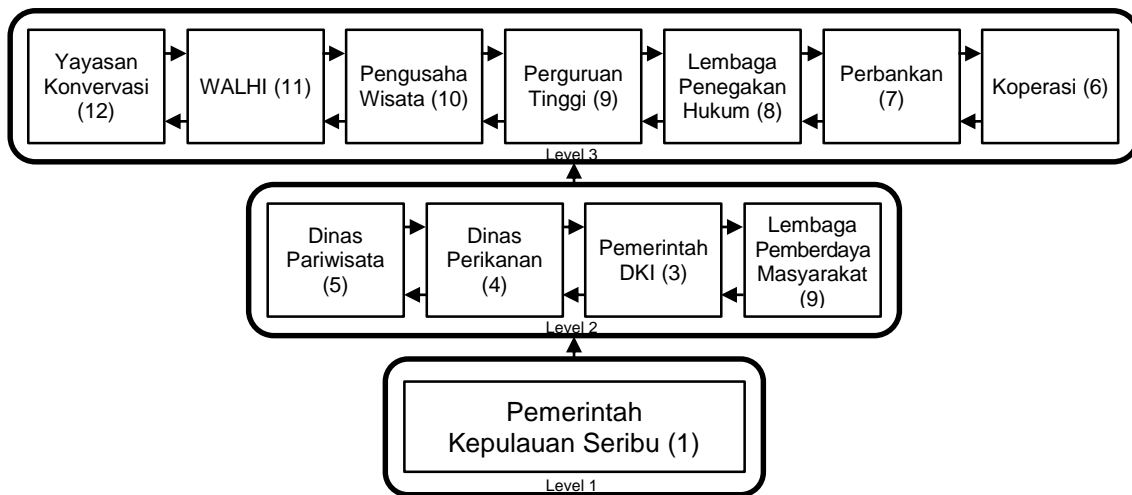
Keterampilan ini masyarakat dapatkan dari pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil analisis ISM menunjukkan bahwa apabila tingkat pendapatan masyarakat meningkat maka dapat terpenuhi syarat kecukupan yang ditetapkan, sehingga mendorong tercapainya tujuan berupa keberdayaan masyarakat bahari dalam pengembangan wisata bahari, terbukanya lapangan pekerjaan, mengurangi pencemaran lingkungan. Apabila kelima tujuan ini telah tercapai, maka dapat mendorong tercapainya tujuan peningkatan daya saing wisata dan meningkatkan pendapatan daerah.

Elemen kunci pada elemen tujuan dari program pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan adalah peningkatan pendapatan masyarakat bahari, penanganannya harus diutamakan

daripada level berikutnya. Berdasarkan *driver power* dan *dependence*, sub elemen (1) Peningkatan pendapatan masyarakat bahari; (2) Memenuhi syarat kecukupan yang ditetapkan; (3) Keberdayaan masyarakat bahari; (4) Terbukanya lapangan pekerjaan; (5) Meningkatkan daya saing wisata; (6) Mengurangi pencemaran lingkungan masuk dalam sektor *linkage*. Hal ini memberikan makna bahwa keenam sub elemen ini sangat harus dikaji secara hati-hati karena hubungan antara sub elemen memiliki keterkaitan yang sangat tinggi dengan sub elemen lainnya.



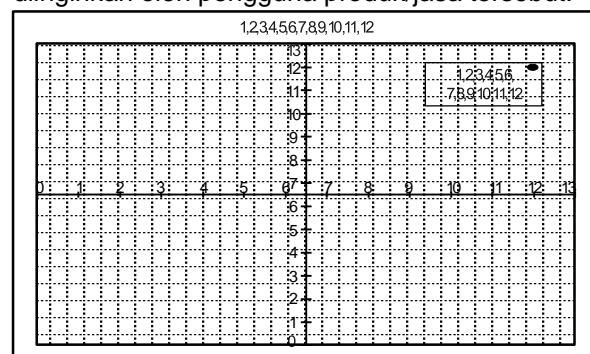
Elemen Lembaga yang Terlibat Program Pengembangan Wisata Bahari



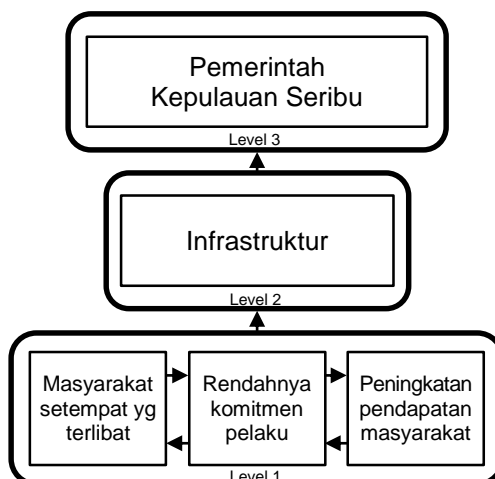
Hasil analisis ISM, menunjukkan elemen kunci dari elemen lembaga yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus berupaya meningkatkan dan menyediakan fasilitas wisata sebagai langkah meningkatkan potensi wilayah yang ada di Pulau Harapan. Pulau Harapan menjadi pusat pemerintahan Kelurahan Pulau Harapan. Dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat, Pulau Harapan memiliki sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor lurah dan rumah dinas kelurahan, puskesmas, KUA, penyuluhan air bersih, fasilitas pembakaran sampah, gedung sekolah (sekolah dasar, ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama).

Sub elemen Pemerintah Kepulauan Seribu berada di sektor *linkage*, yang berarti Pemerintah Kepulauan Seribu memiliki kekuatan penggerak yang besar dalam menghasilkan desain kebijakan pengembangan wisata bahari. Seiring dengan

hasil penelitian Husain Syam (2006) mengenai sistem dan kelembagaan usaha yang berbasis kakao. Selanjutnya hasil penelitian Apik Karyana (2006), mengemukakan bahwa peran lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program yang memiliki peran untuk merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan di wilayah kerjanya sehingga kinerja lembaga mencapai tingkat efisien yang tinggi untuk menghasilkan produk/jasa yang diinginkan oleh pengguna produk/jasa tersebut.



Struktur Elemen Inti Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pulau Harapan



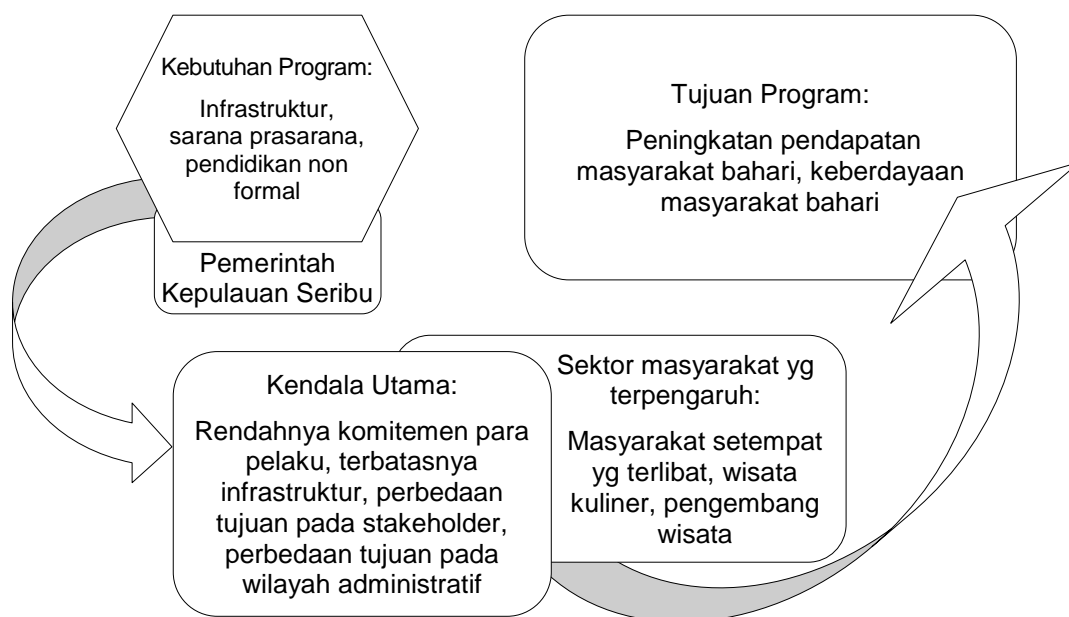
Penggabungan beberapa elemen kunci, maka desain kebijakan pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan diawali oleh elemen masyarakat setempat yang terlibat, rendahnya komitmen pelaku dan peningkatan pendapatan masyarakat bahari, sebagai elemen inti. Sub elemen level 1 ini menjadi inti dan mempengaruhi sub elemen pada level 2 dan 3. Elemen lainnya yang juga merupakan elemen inti pada desain pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan adalah infrastruktur dan Pemerintah Kepulauan Seribu (Level 2 dan 3).

Elemen-elemen tersebut masing-masing memiliki kepentingan dari setiap level. Mulai dari level bawah adalah suatu kebijakan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan lebih awal daripada level berikutnya. Batas bawah merupakan kebijakan

yang didahulukan, sedangkan batas akhir atau atas adalah bagian yang terakhir dikerjakan.

Selanjutnya apabila dalam setiap level ditemukan sub elemen yang sejajar atau setingkat maka kebijakan yang bisa dilakukan adalah perlu ada koordinasi antara lembaga sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Artinya, bisa dilakukan secara bersamaan dan juga dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Tergantung dari hasil kesepakatan antara lembaga yang sudah ditetapkan dalam level tersebut.

Elemen lembaga yang membuat sebuah program, agar program tersebut mampu meminimalisir elemen kendala sehingga pengaruh dari sektor masyarakat mencapai tujuan program yang dapat meningkatkan pengembangan wisata bahari Pulau Harapan.



KESIMPULAN

Kondisi sumberdaya alam Pulau Harapan untuk pengembangan wisata bahari terdiri dari 3 (tiga) yaitu terumbu karang, mangrove dan lamun.

Potensi wisata bahari Pulau Harapan yang dikelola untuk wisata bahari terdiri dari wisata snorkeling, wisata *diving*, wisata mangrove dan wisata lamun.

Desain kebijakan Pulau Harapan dalam pengembangan wisata bahari dengan menggunakan *Interpretative Structural Modeling* adalah elemen lembaga yang membuat sebuah program, agar program tersebut mampu meminimalisir elemen kendala sehingga pengaruh dari sektor masyarakat mencapai tujuan program yang dapat meningkatkan pengembangan wisata bahari Pulau Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. 2003. *Kajian Pengembangan Pariwisata Bahari di Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [DKP] 2010. Program 5 Tahun Mitra Bahari. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- English, S. C, Wilkinson, V. Baker. 1994. *Survey Manual For Tropical Marine Resources*. ASEAN-Australian Marine Science Project: Living Coastal Resources. Australian Institute of Marine Science.
- Husain. 2006. *Model Strukturisasi Sistem dan Kelembagaan Usaha Agro Industri Berbasis Kakao*. Staf Pengajar Fakultas Teknik Mesin Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Karyana, A. 2006. *Analisis Posisi dan Peran Lembaga serta Pengembangan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai (DAS): Studi Kasus di DAS Ciliung*. [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ramli. 2010. *Desain Kebijakan Pengembangan Wisata Pesisir Kota Makasar Berbasis Masyarakat*. [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saxsena, J.P. 1992. *Hierarchy And Clarification of Program Plan Element Using Interpretative Structural Modeling*. *Sistem Practice*, vol 12 (6), 651:670.
- Yudasmar, G.A. 2004. *Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil secara Berkelanjutan*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.